



**SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2016

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Surabaya, Januari 2017
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Sekretariat,

EDI SUPRIYANTO, SH
KOMPOL NRP. 68100172

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1 - 2
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7 - 38
A. Penjelasan Umum	7 - 19
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19 - 24
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	24 - 30
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	30 - 35
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	35 - 37
F. Pengungkapan Penting Lainnya	37 - 41
VI. Lampiran dan Daftar	42 - 47

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
JL. TANGGULANGIN NO 3, SURABAYA
TELEPON 031 5673571, FAXIMILE 031 5673571

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Surabaya, Januari 2017
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Sekretariat,

EDI SUPRIYANTO, SH
KOMPOL NRP. 68100172

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp146.933.219,- atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,-

Realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp21.396.694.262,- atau mencapai 48,60 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp44.023.490.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2016. Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp4.421.592.928,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp3.187.104.756,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.187.310.245,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp47.177.927,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp16.930.875,- dan Rp4.404.662.053,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp41.616.219,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp21.406.985.738,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp21.365.369.519,-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp107.959.131,- dan sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp21.257.410.388,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp24.556.540.155,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp21.257.410.388,- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp48.737.865,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.056.794.421,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp4.404.662.053,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2016		% thd Angg	TA 2015
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	146.933.219	#DIV/0!	5.014.295.344
JUMLAH PENDAPATAN		-	146.933.219	#DIV/0!	5.014.295.344
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	1.517.497.000	1.129.430.581	74,43	491.447.071
Belanja Barang	B.4	42.081.693.000	19.856.204.681	47,18	108.059.101.216
Belanja Modal	B.5	424.300.000	411.059.000	96,88	170.077.500
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	#DIV/0!	0.00
JUMLAH BELANJA		44.023.490.000	21.396.694.262	48,60	108.720.625.787

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**SEKRETARIATBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA TIMUR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2016	2015
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	3.186.669.256	24.158.622.721
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	435.500	266.600
Jumlah Aset Lancar		3.187.104.756	24.158.889.321
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	2.430.926.200	2.080.007.500
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	9.375.000	9.375.000
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(1.252.990.955)	(895.814.437)
Jumlah Aset Tetap		1.187.310.245	1.193.568.063
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	49.500.000	-
Aset Lain-Lain	C.22	10.640.300	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(12.962.373)	-
Jumlah Aset Lainnya		47.177.927	-
JUMLAH ASET		4.421.592.928	25.352.457.384
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	16.930.875	795.917.229
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		16.930.875	795.917.229
JUMLAH KEWAJIBAN		16.930.875	795.917.229
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	4.404.662.053	24.556.540.155
JUMLAH EKUITAS		4.404.662.053	24.556.540.155
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4.421.592.928	25.352.457.384

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2016	2015
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	41.616.219	205.225.052
JUMLAH PENDAPATAN		41.616.219	205.225.052
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1.129.430.581	491.447.071
Beban Persediaan	D.3	57.128.550	157.765.394
Beban Barang dan Jasa	D.4	13.456.822.549	84.968.340.852
Beban Pemeliharaan	D.5	598.956.460	938.218.519
Beban Perjalanan Dinas	D.6	5.745.770.842	22.016.331.581
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	418.876.756	330.904.597
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		21.406.985.738	108.903.008.014
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(21.365.369.519)	(108.697.782.962)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		107.959.131	4.809.070.292
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		107.959.131	4.809.070.292
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(21.257.410.388)	(103.888.712.670)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(21.257.410.388)	(103.888.712.670)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**SEKRETARIATBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2016	2015
EKUITAS AWAL	E.1	24.556.540.155	1.185.321.690
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(21.257.410.388)	(103.888.712.670)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	1.041.344
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	48.737.865	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		48.737.865	1.041.344
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	1.056.794.421	127.258.889.791
EKUITAS AKHIR	E.5	4.404.662.053	24.556.540.155

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum dan Profil Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi JAWA TIMUR

*Dasar
Hukum dan
Profil Entitas*

1. Dasar Hukum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan gubernur;
 3. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon gubernur;
 4. penetapan calon gubernur;
 5. pelaksanaan kampanye;
 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 9. proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan gubernur;

- b. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
- c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
- e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;
- g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
- h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

(2) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat:

- a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
- b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

2. Profil Sekretariat Bawaslu Provinsi

Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi dikepalai oleh Kepala Sekretariat yang bertanggungjawab kepada Bawaslu Provinsi.

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, yaitu :

- a) Kepala Sub Bagian Administrasi;
- b) Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu;
- c) Kepala Sub Bagian Hukum, Humas dan Hubungan Antar Lembaga.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis

Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang

diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan

hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan

Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software/AplikasiKomputer	4
Lisensi	10

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua

belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2016	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	0
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	754.140.000	1.517.497.000
Belanja Barang	7.277.586.000	42.081.693.000
Belanja Modal	76.400.000	424.300.000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	8.108.126.000	44.023.490.000

Realisasi

Pendapatan

Rp146.933.21

9

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp146.933.219 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur terdiri dari

Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	-	41.616.219	#DIV/0!
Pendapatan Lain-lain	-	105.317.000	#DIV/0!
Jumlah	-	146.933.219	#DIV/0!

Realisasi Pendapatan berasal dari Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) dari rekening Hibah Langsung 6 Panwas Kabupaten/Kota yang telah di setor ke Kas Negara dan berasal dari Pengembalian belanja Tahun Anggaran Yang lalu sebagaimana bukti terlampir pada (Lampiran III) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	282,000
2	Pengembalian Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	105,035,000
3	Jasa Giro Panwas Kab. Kediri Tahun 2016	26,968,176
4	Jasa Giro Panwas Kab. Kediri Tahun 2016	6,838,030
5	Jasa Giro Kab Pacitan Tahun 2016	1,269,469
6	Jasa Giro Kab Pacitan Tahun 2016	220,640
7	Jasa Giro Kab. Ponorogo Tahun 2016	1,235,894
8	Jasa Giro Kab. Sumenep Tahun 2016	549,147
9	Jasa Giro Kab. Mojokerto Tahun 2016	592,896
10	Jasa Giro Kota Batu Tahun 2016	353,773
11	Jasa Giro Kota Batu Tahun 2016	257,411
12	Jasa Giro Kota Batu Tahun 2016	282,603
13	Jasa Giro Kota Batu Tahun 2016	3,048,180
JUMLAH		146,933,219

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2016 mengalami Penurunan 79,72 persen dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pelayanan (jasa) akuntansi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Selain itu, Pendapatan Lain-lain Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur mengalami Penurunan sebesar 97,81 persen yang berasal antara lain dari pendapatan pengembalian belanja barang dan belanja pegawai yang berasal dari tahun anggaran yang lalu.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI T.A. 2016	REALISASI T.A. 2015	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	41.616.219	205.225.052	-79,72
Pendapatan Lain-lain	105.317.000	4.809.070.292	-97,81
Jumlah	146.933.219	5.014.295.344	-97,07

Realisasi

Belanja Negara

Rp21.396.694.2

62

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2016 adalah sebesar Rp21.396.694.262 atau 48,60% dari anggaran belanja sebesar Rp44.023.490.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2016

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	1.517.497.000	1.129.431.256	74,43
Belanja Barang	42.081.693.000	19.871.715.081	47,22
Belanja Modal	424.300.000	411.059.000	96,88
Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!
Total Belanja Kotor	44.023.490.000	21.412.205.337	48,64
Pengembalian		(15.511.075)	-
Jumlah	44.023.490.000	21.396.694.262	48,60

Dibandingkan dengan TA 2015, Realisasi Belanja TA 2016 mengalami penurunan sebesar 80,32% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pendapatan hibah langsung Pengawas Pemilu Ad-Hoc di 20 Kabupaten/Kota tahun 2016 sangat kecil dibanding tahun 2015 karena 20 Kabupaten/Kota hanya 9 Kabupaten/Kota yang mendapatkan NPHD di tahun 2016, sedangkan 11 Kabupaten/Kota hanya melanjutkan NPHD yang ada pada tahun 2015.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1.129.430.581	491.447.071	129,82
Belanja Barang	19.856.204.681	108.059.101.216	(81,62)
Belanja Modal	411.059.000	170.077.500	141,69
Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!
Jumlah	21.396.694.262	108.720.625.787	(80,32)

*Belanja
Pegawai
Rp1.129.430.581*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.129.430.581 dan Rp491.447.071. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 129,82 persen dari TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun mendatang.
2. Penambahan remunerasi PNS.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	712.665.156	103.587.071	587,99
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	364.647.000	316.800.000	15,10
Belanja Honorarium		0	#DIV/0!
Belanja Lembur	52.119.100	71.060.000	(26,65)
Belanja Vakasi		-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	1.129.431.256	491.447.071	129,82
Pengembalian Belanja Pegawai	(675)	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja	1.129.430.581	491.447.071	129,82

*Belanja
Barang Rp
19.856.204.681*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp19.856.204.681 dan Rp108.059.101.216. Realisasi Belanja Barang TA 2016 mengalami penurunan 81,62% dari Realisasi Belanja Barang TA 2015. Hal ini antara lain disebabkan oleh pendapatan hibah langsung Pengawas Pemilu Ad-Hoc di 20 Kabupaten/Kota tahun 2016 sangat kecil dibanding tahun 2015 karena 20 Kabupaten/Kota hanya 9 Kabupaten/Kota yang mendapatkan NPHD di tahun 2016, sedangkan 11 Kabupaten/Kota hanya

melanjutkan NPHD yang ada pada tahun 2015.

Perbandingan Belanja Barang TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	8.126.917.540	58.091.760.961	(86,01)
Belanja Barang Non Operasional	2.554.294.530	20.484.957.516	(87,53)
Belanja Jasa	2.844.425.709	6.559.218.645	(56,63)
Belanja Pemeliharaan	598.956.460	938.218.519	(36,16)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5.747.120.842	22.016.331.581	(73,90)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	#VALUE!
Jumlah Belanja Kotor	19.871.715.081	108.090.487.222	(81,62)
Pengembalian Belanja	(15.510.400)	(31.386.006)	
Jumlah Belanja	19.856.204.681	108.059.101.216	(81,62)

*Belanja Modal
Rp 411.059.000*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp411.059.000 dan Rp.170.077.500. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 141,69% dibandingkan TA 2015 disebabkan oleh implementasi akuntansi berbasis akrual, dan berakibat peningkatan kebutuhan fasilitas pelatihan akuntansi, berupa tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan, irigasi serta belanja modal lainnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI T.A. 2016	REALISASI T.A 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	361.559.000	170.077.500	112,58
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Lainnya	49.500.000	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	411.059.000	170.077.500	141,69
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	411.059.000	170.077.500	141,69

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 adalah sebesar Rp 361.559.000, mengalami kenaikan sebesar 112,58 persen bila dibandingkan dengan

realisasi TA 2015 sebesar Rp170.077.500. Hal ini disebabkan oleh penambahan ruang kegiatan baru sentra gakkumdu yang diikuti dengan penambahan peralatan dan mesin sebagai fasilitas ruang.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 dan 2015

uraian	realisasi tahun 2016	realisasi tahun 2015	naik (turun)%
Alat Kantor	24,260,500	48,208,500	-98.71
Alat Rumah Tangga	72,022,500	42,570,000	40.89
Alat Studio	143,429,000	-	100.00
Alat Komunikasi	2,486,000	-	100.00
Komputer Unit	25,476,000	49,599,000	-94.69
Peralatan Komputer	93,885,000	29,700,000	68.37
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	361,559,000	170,077,500	52.96

B.5.2 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 49.500.000 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 100 persen dibandingkan Realisasi TA 2015. Hal ini disebabkan pengadaan *software* untuk mendukung implementasi akuntansi pendapatan berbasis akrual.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp 3.186.669.256

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 3.186.669.256 dan Rp 24.158.622.721.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan Setara kas yaitu dana hibah Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/kota yang belum di SP2HL dan/atau SP4HL dan/atau masih dipergunakan untuk mendukung operasional tahapan pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota tahun 2017. Rincian sumber Kas Lainnya dan

Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2016 dan 2015

NO	Keterangan	TH 2016	TH 2015
1	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (Pajak 2015 setor 2016)		2.496.339
2	Hibah Kota Blitar		608.778.549
3	Hibah Kota Surabaya		45.415.453
4	Hibah Kota Pasuruan		942.801.484
5	Hibah Kab. Ngawi		50.488.518
6	Hibah Kab. Lamongan		1.114.744.109
7	Hibah Kab. Jember		6.058.263.582
8	Hibah Kab. Kediri		4.243.358.000
9	Hibah Kab. Situbondo	1.391.590.585	1.391.590.585
10	Hibah Kab. Mojokerto		754.294.841
11	Hibah Kab. Sumenep		632.648.344
12	Hibah Kab. Banyuwangi		1.717.803.633
13	Hibah Kab. Malang		2.047.260.000
14	Hibah Kab. Sidoarjo		1.959.177.880
15	Hibah Kab. Blitar		1.813.010.900
16	Hibah Kota Batu	1.795.078.671	-
17	Jasa Giro Tuban		9.266.016
18	Pajak 2015 setor 2016 Jember		31.026.035
19	Pajak 2015 setor 2016 Kab.		1.400.000
20	Selisih berkas Mojokerto		241.884.179
21	Jasa Giro Gresik		9.201.030
22	SP4HL Gresik		464.450.198
23	Sisa Kas Surabaya		796.000
24	Jasa Giro Tuban		9.266.016
25	Jasa Giro Gresik		9.201.030
	Jumlah	3.186.669.256	24.158.622.721

*Persediaan Rp
435.500*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp435.500 dan Rp266.600.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2016 dan 2015

Jenis	TH 2016	TH 2015
Barang Konsumsi	435.500	266.600
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	435.500	266.600

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Peralatan dan **C.15 Peralatan dan Mesin**

Mesin

Rp 2.430.926.200

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp 2.430.926.200 dan Rp 2.080.007.500. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	2,080,007,500
Mutasi tambah:	
Pembelian	361,559,000
Reklasifikasi Masuk	75,999,000
Koreksi tambah	
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi Keluar	(75,999,000)
Penghentian dari penggunaan	(10,640,300)
Saldo per 31 Desember 2016	2,430,926,200
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	-1,247,365,995
Nilai Buku per 31 Desember 2016	1,183,560,205

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- Pembelian untuk pengadaan meubelair dan peralatan perkantoran sebesar Rp37.576.000 dan pengadaan meubelair sentra gakkumdu dan peralatan perkantoran sentra gakkumdu sebesar Rp323.983.000.
- Reklasifikasi masuk atas BMN Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio, dan Peralatan Komputer dengan total nilai sebesar Rp75.999.000

Mutasi kurang merupakan penghentian penggunaan atas BMN yang mengalami kondisi Rusak Berat berupa enam Alat Penghancur Kertas dan Printer dengan total nilai sebesar Rp10.640.300 serta Reklasifikasi keluar atas BMN Alat Rumah Tangga, Peralatan Pemancar, Alat

Kedokteran, Unit Laboratorium, dan Komputer Unit dengan total nilai sebesar Rp75.999.000.

Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp 9.375.000

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 9.375.000 dan Rp 9.375.000. Tidak terdapat mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	9,375,000
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2016	9,375,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	(5,625,000)
Nilai Buku per 31 Desember 2016	3,750,000

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp 1.252.990.955

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing Rp1.259.765.828 dan Rp895.814.437. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
TA 2016 dan 2015*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2,430,926,200	1,247,365,955	1,183,560,245
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9,375,000	5,625,000	3,750,000
4	Aset Tetap Lainnya	10,640,300	6,774,873	3,865,427
Akumulasi Penyusutan		2,450,941,500	1,259,765,828	1,191,175,672

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak
Berwujud Rp
49.500.000*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp49.500.000 dan Rp 0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	49,500,000
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2016	49,500,000
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2016	(6,187,500)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	43,312,500

Mutasi tambah:

- Pembelian berupa Website Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud TA 2016

Uraian	Nilai Perolehan
Website Bawaslu Prov Jatim	49.500.000
Jumlah	49.500.000

*Aset Lain-Lain
Rp 10.640.300*

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp10.640.330 dan Rp 0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2015	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	10,640,300
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2016	10,640,300
Akumulasi Penyusutan	(6,774,873)
Nilai Buku per 31 Desember 2016	3,865,427

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penambahan adalah dari reklasifikasi enam alat penghancur kertas dan satu printer dengan total nilai sebesar Rp10.640.300.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp 12.962.373*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing Rp12.962.373 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	49,500,000	6,187,500	43,312,500
Jumlah	49,500,000	6,187,500	43,312,500
Aset Lain-lain	10,640,300	6,774,873	3,865,427
Jumlah	60,140,300	12,962,373	47,177,927

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Utang kepada Pihak Ketiga
Rp 16.930.875*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp16.930.875 dan Rp795.917.229. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Pembayaran Listrik bulan desember 2016	9.004.998	
Pembayaran Air bulan desember 2016	507.840	
Pembayaran Telpon bulan desember 2016	1.417.037	
Pembayaran Internet bulan desember 2016	6.001.000	
Total	16.930.875	

*Ekuitas
Rp 4.404.662.053*

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp4.404.662.053 dan Rp24.556.540.155. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan PNB
Rp146.933.219*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp146.933.219 dan Rp5.014.295.344. Pendapatan

tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2016 dan 2015

URAIAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	41.616.219	205.225.052	(79,72)
Pendapatan Lain-lain	105.317.000	4.809.070.292	(97,81)
Jumlah	146.933.219	5.014.295.344	(97,07)

Pendapatan Jasa berasal dari Jasa Giro Kabupaten Kota. Sedangkan Pendapatan Lain-Lain merupakan pengembalian belanja barang, Pegawai dan belanja lainnya yang berasal dari transaksi tahun 2014.

Beban

Pegawai Rp

1.129.430.580

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.129.430.581 dan Rp491.447.071. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2016 dan 2015

URAIAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	485.521.000	383.747.864	26,52
Beban Tunjangan-tunjangan	591.790.481	74.395.207	695,47
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	#DIV/0!
Beban Lembur	52.119.100	33.304.000	56,50
Jumlah	1.129.430.581	491.447.071	129,82

Beban

Persediaan Rp

57.128.550

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp57.128.550 dan

Rp157.765.394. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2016 dan 2015

URAIAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	57.128.550	157.765.394	(63,79)
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Lainnya	0	0	#DIV/0!
Jumlah	57.128.550	157.765.394	(63,79)

Beban Barang dan Jasa Rp 13.456.822.549

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp13.456.822.549 dan Rp84.968.340.852. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena berakhirnya panitia pengawasan pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota sesuai tahapan pemilihan yang berlaku pada bulan maret 2016. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	12.371.632.651	78.392.191.821	(84,22)
Beban Langganan Daya dan Jasa	221.967.268	4.415.948.352	(94,97)
Beban Jasa Pos dan Giro	3.781.780	9.109.312	(58,48)
Beban Jasa Konsultan	27.000.000	122.000.000	(77,87)
Beban Jasa Profesi	273.780.000	1.341.095.000	(79,59)
Beban Jasa Lainnya	558.660.850	687.996.367	(18,80)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0	0	#DIV/0!
Jumlah	13.456.822.549	84.968.340.852	(84,16)

Beban

D.5 Beban Pemeliharaan

Pemeliharaan

Rp

598.956.460

Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp598.956.460 dan Rp938.218.519. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin dan juga berakhirnya panitia pengawasan pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota sesuai tahapan pemilihan yang berlaku pada bulan maret 2016. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	101.187.000	142.791.200	(29,14)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	491.869.339	781.547.750	(37,06)
Beban Pemeliharaan Lainnya	5.900.121	13.879.569	(57,49)
Jumlah	598.956.460	938.218.519	(36,16)

Beban

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Perjalanan

Dinas Rp

5.745.770.842

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp5.745.770.842 dan Rp22.016.331.581. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat bersama panitia pengawasan pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota karena telah berakhir sesuai tahapan pemilihan yang berlaku pada bulan maret 2016. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	3.590.794.642	9.448.182.264	-61,99
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.650.000	1.381.765.000	-92,72
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.912.996.000	10.302.393.230	-81,43
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	141.330.200	883.991.087	-84,01
Jumlah	5.745.770.842	22.016.331.581	-73,90

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 418.876.756

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp418.876.756 dan Rp330.904.597. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

TA 2016 dan 2015

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	409,739,543	329,029,597	19.70
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	1,875,000	1,875,000	0.00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1,074,713	-	100.00
Jumlah Penyusutan	412,689,256	330,904,597	19.82
			-
Beban Amortisasi Software	6,187,500	-	100.00
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	6,187,500	-	100.00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	418,876,756	330,904,597	21.00

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp 107.959.131

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan

2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2016 dan 2015

URAIAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	282.000	1.174.500	(75,99)
Penerimaan kembali belanja barang TAYL	105.035.000	4.802.291.064	(97,81)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	2.794.131	0	#DIV/0!
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(152.000)	0	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	107.959.131	4.803.465.564	(97,75)

**)Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp

24.556.540.155

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp24.556.540.155 dan Rp1.185.321.690.

Defisit LO

Rp

21.257.410.388

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp21.257.410.388 dan Rp103.888.712.670. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp 0

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp0 dan Rp1.041.344. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

KoreksiAset

Tetap Non

Revaluasi Rp

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah

48.737.865 sebesar Rp48.737.865 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2016

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	48,737,865
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	48,737,865

Transaksi

E.4 Transaksi Antar Entitas

Antar Entitas

Rp 1.056.794.421

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.056.794.421 dan Rp127.258.889.791. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(146.933.219)
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.053.201.833
Transfer Masuk	
Transfer Keluar	
Pengesahan Hibah Langsung	11.500.267.664
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(16.349.741.857)
Jumlah	1.056.794.421

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2016, DDEL sebesar Rp146.933.219 sedangkan DKEL sebesar Rp6.053.201.833

E.4.2 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas

pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp11.500.267.664-. dari total Rp11.500.267.664,- yang diterima sepanjang tahun 2016.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah Rp16.349.741.857.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	Pemerintah Kota Surabaya	Uang	1.561.126.900
2	Pemerintah Kab. Ngawi	Uang	889.111.750
3	Pemerintah Kab. Ponorogo	Uang	730.000.000
4	Pemerintah Kab. Gresik	Uang	297.604.164
5	Pemerintah Kab. Trenggalek	Uang	324.995.000
6	Pemerintah Kab. Sumenep	Uang	2.915.712.850
7	Pemerintah Kab. Pacitan	Uang	750.000.000
8	Pemerintah Kab. Tuban	Uang	1.131.717.000
9	Pemerintah Kota Batu	Uang	2.900.000.000
Total Pengesahan			Rp 11.500.267.664
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp 1.782.462.488
Jumlah			Rp 9.717.805.176

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2016 disajikan pada lampiran.

Ekuitas Akhir
Rp 4.404.662.053

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp4.404.662.053 dan Rp24.556.540.155.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor

0126/ K.BAWASLU/ KU.01.00/ V/ 2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor: 1275 – KEP TAHUN 2015 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada tanggal 23 Mei 2016, Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 36/ K.BAWASLU/ KU.01.00/ V/ 2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 11/ SK/ BAWASLU-PROV/ JTM/ I/2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen pada tanggal 1 Mei 2016, telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan,

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Triza Novia, S.Sos
Pejabat Pembuat Komitmen	: Abdul Kohar, SH
Pejabat Penandatanganan/ Penguji SPM	: Anditya S M, S.Si
Bendahara	: Reny Trijayanti

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Edi Supriyanto, SH
Pejabat Pembuat Komitmen	: Edi Supriyanto, SH
Pejabat Penandatanganan/ Penguji SPM	: Anditya S M, S.Si
Bendahara	: Reny Trijayanti

- Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 53/ BAWASLU-PROV.JI/ KU.01.00/ XI/ 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang

Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen pada tanggal 10 November 2016, dan Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 54/BAWASLU-PROV.JI / KU.01.00 / XI / 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan SPM pada tanggal 10 November 2016 Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan,

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Edi Supriyanto, SH
Pejabat Pembuat Komitmen	: Edi Supriyanto, SH
Pejabat Penandatanganan/ Penguji SPM	: Anditya S M, S.Si
Bendahara	: Reny Trijayanti

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Edi Supriyanto, SH
Pejabat Pembuat Komitmen	: Anditya S M, S.Si
Pejabat Penandatanganan/ Penguji SPM	: Arif Priyono, S.E
Bendahara	: Reny Trijayanti

- Permasalahan dana hibah Pilkada 2015 Panwaslih Kabupaten Situbondo hingga saat ini belum dapat dilakukan pengesahan dikarenakan tidak tersedianya pertanggungjawaban yang cukup atas pengesahan yang diajukan oleh Panwaslih Kabupaten Situbondo. Adapun kronologis permasalahan tersebut dapat kami sajikan sebagai berikut :

- Tanggal 16 s.d. 18 Juni 2016. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan badan Pengawas Pemilu tahun 2015 No. 15c/HP/XIV/05/2016 tanggal 19 Mei 2016, tim verifikasi Bagian Pengawasan Internal (Pirgok, Arif Priyono), Bagian Keuangan Bawaslu RI (Hendra), Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Anditya, Trimuda Ancas), melakukan tindak lanjut atas verifikasi berkas pada panwas Situbondo yang telah diajukan SP2HL. Dari SP2HL senilai Rp4.108.409.415,00, SPJ yang baru dapat disajikan sebesar Rp2.866.703.600,00. Sehingga masih terdapat kurang saji senilai Rp1.241.705.815,00.
- Tanggal 21 Juli 2016, tim verifikasi Bagian Pengawasan Internal (Pirgok, Arif Priyono, M. Fadhil), Bagian Keuangan Bawaslu RI (Hendra, Yunan, Bernadus Aji) melakukan verifikasi ulang terhadap SPJ Panwaslih Kabupaten Situbondo. Berdasarkan hasil verifikasi ulang, terdapat kekurangan SPJ tahun 2015 sebesar Rp261.645.641,00. SPJ tahun 2016 yang dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp346.507.418,00.
- Berdasarkan laporan Hasil Audit Bagian Pengawasan Internal No.0056/LHK/PI/B.H2PI/VII/2016, Bawaslu Provinsi Jawa Timur mendapat surat Sekjen No. 0147/Bawaslu/SJ/PW.06.02/VIII/2016 yang diteruskan kepada mantan Kasek dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslih Kabupaten Situbondo, dengan surat No.239/BAWASLU PROV.JI/IX/2016.
- Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyampaikan surat konsultasi permohonan penjelasan selisih pagu hibah kepada kantor kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur No.344/Bawaslu Prov.JI/XI/2016 tanggal 28 November 2016.
- Kanwil Dirjen Perbendaharaan Jawa Timur membuat surat balasan dengan no.S-/WPB.16/BD.02/2016.
- Tanggal 16 Januari 2017, Bawaslu provinsi Jawa Timur mengadakan rapat bersama dengan Bagian Keuangan dan Pengawasan Internal Bawaslu RI di ruang rapat Lt.4 Bawaslu RI, dengan hasil rapat yaitu menghadap ke Ditjen PA Kemenkeu pusat dalam rangka konsultasi. Ditemui oleh Kepala Seksi Ditjen PA wilayah IV Bpk. Hari Utomo. Selanjutnya didelegasikan kepada Bpk. Syamsul Arifin.
- Tanggal 17 Januari 2017, Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengajukan proses revisi DIPA, dengan melampirkan berkas Surat pengantar revisi,

matriks usulan revisi, matriks semula menjadi, DIPA petikan revisi terakhir.

- Tanggal 18 januari 2017, kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur mengintstruksikan untuk melakukan perbaikan atas pengajuan revisi DIPA disesuaikan dengan nilai addendum NPHD Situbondo.
- Tanggal 19 januari 2017, Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengajukan ulang revisi kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur, dengan menambahkan nilai hibah Kabupaten Situbondo senilai Rp548.260.000,00.
- Tanggal 20 Januari 2017 pukul 10:30, revisi DIPA hibah dapat diproses termasuk dana hibah Situbondo senilai Rp548.260.000,00.
- Tanggal 20 januari 2017 pukul 15:00, proses SP2HL atas sisa dana hibah panwaslih kab Situbondo tidak dapat dilakukan karena tidak ada nya data SPJ tahun 2016 yang valid. Konter KPPN setelah pukul 15:00 tidak dapat menerima pengajuan SPM.

Lampiran I: Rincian Akumulasi Penyusutan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.
		Manfaat		Per 30-06-2015	Tahun 2016	Per 31-12-2016
A	Tanah					
1	Tanah		-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-
B	Peralatan dan Mesin					
	Alat Berat		6,930,000	1,485,000	990,000	2,475,000
1	Alat Angkutan Darat Bermotor		1,070,480,000	495,988,574	141,822,502	593,637,850
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga		583,063,700	160,965,690	107,896,625	260,930,895
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar		197,576,500	20,239,486	24,882,920	44,881,210
	Alat Kedokteran dan Laboratorium		-	1,084,190	1,084,185	-
	Alat Persenjataan		396,000	95,700	109,560	247,500
5	Komputer Unit		349,983,000	159,784,462	88,032,459	245,246,124
6	Peralatan Komputer		222,497,000	52,421,335	44,921,292	99,947,376
	Jumlah		2,430,926,200	892,064,437	409,739,543	1,247,365,955
D	Jaringan					
1	Instalasi Lain		9,375,000	3,750,000	1,875,000	5,625,000
	Jumlah		9,375,000	3,750,000	1,875,000	5,625,000
E	Konstruksi Dalam Pengerjaan					
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan		-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-
F	Aset Tetap Lainnya					
1	Barang bercorak kesenian		-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-
G	Aset Lainnya					
1	Aset tak Berwujud*		49,500,000	-	6,187,500	6,187,500
2	Aset Tetap yang tidak digunakan		10,640,300	-	1,074,713	6,774,873
	Jumlah		60,140,300	-	7,262,213	12,962,373
	Total		2,500,441,500	895,814,437	418,876,756	1,265,953,328

* Beban Amortisasi

Lampiran II: Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/JASA
PER 31 DESEMBER 2016

No	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Ket.
1	Pemerintah Kota Surabaya	Uang	DN	Rp 1.561.126.900	Rp 1.561.126.900	Rp -	
2	Pemerintah Kab. Ngawi	Uang	DN	Rp 889.111.750	Rp 889.111.750	Rp -	
3	Pemerintah Kab. Ponorogo	Uang	DN	Rp 730.000.000	Rp 730.000.000	Rp -	
4	Pemerintah Kab. Gresik	Uang	DN	Rp 297.604.164	Rp 297.604.164	Rp -	
5	Pemerintah Kab. Trenggalek	Uang	DN	Rp 324.995.000	Rp 324.995.000	Rp -	
6	Pemerintah Kab. Sumenep	Uang	DN	Rp 2.915.712.850	Rp 2.915.712.850	Rp -	
7	Pemerintah Kab. Pacitan	Uang	DN	Rp 750.000.000	Rp 750.000.000	Rp -	
8	Pemerintah Kab. Tuban	Uang	DN	Rp 1.131.717.000	Rp 1.131.717.000	Rp -	
9	Pemerintah Kota Batu	Uang	DN	Rp 2.900.000.000	Rp 1.104.921.329	Rp 1.795.078.671	Lanjut tahun 2017
Jumlah				Rp 11.500.267.664	Rp 9.705.188.993	Rp 1.795.078.671	

Lampiran III: Rekap Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

No	Uraian	Jumlah
1	Pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	282.000
2	Pengembalian Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	5.000.000
3	Pengembalian Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	89.185.000
4	Pengembalian Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	10.500.000
5	Pengembalian Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	350.000
6	Jasa Giro Panwas Kab. Kediri Tahun 2016	26.968.176
7	Jasa Giro Panwas Kab. Kediri Tahun 2016	6.838.030
8	Jasa Giro Kab Pacitan Tahun 2016	1.269.469
9	Jasa Giro Kab Pacitan Tahun 2016	220.640
10	Jasa Giro Kab. Ponorogo Tahun 2016	1.235.894
11	Jasa Giro Kab. Sumenep Tahun 2016	549.147
12	Jasa Giro Kab. Mojokerto Tahun 2016	592.896
13	Jasa Giro Kota Batu Tahun 2016	353.773
14	Jasa Giro Kota Batu Tahun 2016	257.411
15	Jasa Giro Kota Batu Tahun 2016	282.603
16	Jasa Giro Kota Batu Tahun 2016	3.048.180
JUMLAH		146.933.219